

**KERJA SAMA KONTRATERORISME INDONESIA-FILIPINA MELAWAN ABU
SAYYAF PADA TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR ALGHIEFFARI

18323189

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**KERJA SAMA KONTRATERORISME INDONESIA-FILIPINA MELAWAN ABU
SAYYAF PADA TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR ALGHIFARI

18323189

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KERJA SAMA KONTRATERORISME INDONESIA-FILIPINA MELAWAN ABU
SAYYAF PADA TAHUN 2015-2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh

derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Kema Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
2. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D
3. Gusri Eri Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

9 Februari 2023



Muhammad Fajar Al Ghiffari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	10
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	11
1.8.4 Proses Penelitian	12
1.9 Sistematika Pembahasan	12
BAB II KERJA SAMA KONTRATERORISME 2015-2020	14
2.1. Ancaman Abu Sayyaf di Filipina dan Indonesia	14
2.1.1 Terorisme di Indonesia	17
2.1.2 Terorisme di Filipina	20
2.2 Kerja sama Indonesia-Filipina di Bidang Kontraterorisme	23
BAB III PERAN INDONESIA DAN FILIPINA DALAM KONTRATERORISME	26
3.1 Kerja Sama dalam Pelacakan Sumber Pendanaan Kelompok Abu Sayyaf	28

3.2 Pengembangan Teknologi dalam Kontraterorisme	31
3.3 Penguatan Personil Polisi dan Militer dalam Aksi Kontraterorisme	33
3.4. Penguatan Lembaga-Lembaga Terkait Teroris dan Memperbarui Hukuman terhadap Para Pelaku Aksi Teror	36
3.4.1 Penguatan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Bidang Penanganan Terorisme	36
3.4.2 Pembaruan Hukum terhadap para pelaku Aksi terorisme	38
3.5 Kerja Sama Regional Maupun Internasional dalam Penanganan Kontraterorisme	41
3.6 Pengelolaan Media Agar Tidak Ada Penggiringan Opini yang Dibuat-buat Terkait Aksi Terorisme	47
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1.1



DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
ACCT	: <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>
ADMM	: <i>ASEAN Defence Ministers' Meeting</i>
AFP	: <i>Armed Forces of the Philippines</i>
AMLC	: <i>Anti-Money Laundering Council</i>
APU PPT	: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASG	: <i>Abu Sayyaf Group</i>
ASLOM	: <i>ASEAN Senior Law Officials Meeting</i>
ATC-PMC	: <i>Anti-Terrorism Council Program Management Center</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BI	: <i>Bureau of Immigration</i>
BIN	: Badan Intelejen Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BSP	: <i>Banko Sentral Ng Filipina</i>
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
FATF	: <i>Financial Action Task Force)</i>
GWOT	: <i>Global War on Terrorism</i>
HAS	: <i>Human Security Act</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Suriah</i>
JAD	: Jamaah Ansharut Daulah
JI	: Jemaah Islamiyah
JWG	: <i>Joint Working Group</i>
KEJAGUNG RI	: Kejaksaan Agung Republik Indonesia
KEMENKUMHAM RI	: Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia

KTN	: Kawasan Terpadu Nusantara
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KYC	: <i>Know Your Customer Principle</i>
MILF	: <i>Moro Islamic Liberation Front</i>
MLAT	: <i>Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Treaty</i>
MNLF	: <i>Moro National Liberation Front</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NICA	: <i>National Intelligence Coordinating Agency</i>
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PNP	: <i>Philippine National Police</i>
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TFTP	: <i>Terrorist Finance Tracking Programme</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia



ABSTRAK

Gerakan Abu Sayyaf di mulai pada 1991 kelompok ini merupakan sebuah kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam sebagai dasar kelompok ini, kelompok Abu Sayyaf berbasis di wilayah Filipina Selatan seperti di wilayah Basilan, Mindanao, dan Jolo. Dalam beberapa kasus mereka juga menculik WNI seperti yang terjadi pada 20 Maret 2016, 2 kapal Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina dan 10 WNI disandera, dalam penyanderaan tersebut kelompok Abu Sayyaf minta tebusan sekitar 14 miliar dengan tenggang waktu 1 minggu, dalam melakukan perundingan untuk pembebasan juru runding Indonesia yaitu Bapak Kivlan Zein berhasil melakukan perundingan dan akhirnya para WNI berhasil bebas. Maka, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh Peran kerjasama Indonesia-Filipina dalam counter terorisme kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2020. Penelitian Ini menggunakan teori *Counter Terrorism* oleh Todd Sandler. Dalam implementasi kontraterorisme mencakup kerja sama dalam pelacakan aliran keuangan kelompok terorisme, pengembangan teknologi dalam kontraterorisme, penguatan personil khususnya polisi dan militer dalam aksi kontraterorisme, Memperkuat lembaga-lembaga terkait teroris dan memberikan pandangan kepada masyarakat internasional terkait terorisme dan memperbarui hukuman terhadap para pelaku aksi teror, Membentuk kerja sama regional maupun secara internasional, Pengelolaan media agar tidak ada penggiringan opini. Dalam teori ini, enam tipologi terkait digunakan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam penanganan terorisme kelompok Abu Sayyaf.

Kata kunci: Abu Sayyaf, *Counter Terrorism*, Filipina, Indonesia, Kerjasama

Abstract

Since 1991 Abu Sayyaf movement was found, they are the radical group that uses Islam as their belief. The group based in Southern Philippine around Basilan, Mindanao and Jolo. In some cases at March 20 2016, they kidnaped Indonesian citizens, two Indonesian ships were hijacked by the Abu Sayyaf group in the Philippine and 10 Indonesian citizens were taken hostage, in the hostage-taking the Abu Sayyaf group asked for a ransom of around 14 billion

with a grace period of 1 week, in carrying out the murder for the action of running Indonesia, namely Mr. Kivlan Zein succeeded in carrying out difficulties and finally the Indonesian citizens managed to be free. This research will see how much the role of Philippine and Indonesia as a states that collaborate to counter terrorism the Abu Sayyaf movement in 2015-2020. This study uses Counter Terrorism theory by Todd Sandler. The implementation of counter terrorism includes cooperation in tracking the financial flows of terrorist groups, developing technology in counter terrorism, strengthening personnel, especially the police and military in counter terrorism actions, strengthening related terrorist institutions and providing views to the international community regarding terrorism and imposing punishments on terrorists. perpetrators of acts of terror, forming regional and international cooperation, managing the media so that there is no swaying of opinion. In this theory, six related typologies are used by the Governments of Indonesia and the Philippines in handling Abu Sayyaf group.

Keywords: Abu Sayyaf, Counter Terrorism, Philippine, Indonesia, Cooperation

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme yang identik dengan pengeboman, penyanderaan, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan secara massif dengan target acak, biasanya kelompok terorisme terbentuk karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang memimpin suatu wilayah negara, ada pula kelompok terorisme yang terbentuk atas dasar agama, yang membuat pandangan buruk terhadap agama tertentu dikarenakan adanya kelompok ekstrim radikal yang mengatasnamakan agama. Pada awal tahun 1970-an kelompok terorisme internasional banyak melakukan aksi dimana korban jiwa sangat banyak, dalam pemetaan korban di tiap kawasan mencapai 9.500 korban jiwa dan sekitar 3.000 lainnya luka berat. Di era 2000an muncul berbagai kelompok terorisme yang terbentuk di berbagai macam kawasan, seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Asia dan Eropa (Kusumah, 2002). Kasus terorisme muncul dan menjadi topik yang hangat setelah terjadinya penabrakan pesawat American Airlines ke menara kembar WTC pada 11 September 2001, aksi ini dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, kejadian tersebut membuka mata dunia tentang bagaimana kelompok terorisme menebar teror yang tidak main-main. Dalam ruang lingkup Asia Tenggara sendiri banyak kelompok-kelompok terorisme yang muncul seperti *ISIS*, *Abu Sayyaf Group (ASG)*, *Jemaah Islamiyah (JI)*, *Jamaah Anshorut (JAD)* dan beberapa kelompok kecil yang mendiami wilayah kepulauan di Asia Tenggara, kelompok separatis ekstrim yang rata-rata berlandaskan pada agama

dimana kelompok ini ingin membentuk negara yang berdasarkan hukum Islam dan menentang semua pemerintahan dan bahkan memerangi pemerintahan dengan berbagai macam aksi teror yang mereka lakukan, baik dengan pengeboman, penyanderaan, dan bahkan penyerangan terhadap warga sipil dan bahkan polisi hingga tentara.(Setiani Dayana, 2019).

Dalam penelitian ini mengambil cakupan tahun 2015-2020 dikarenakan pada awalnya kasus ini yang belum menjadi prioritas antara kedua negara namun setelah beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan mulai tahun 2015-2017 kasus terorisme di Filipina mulai naik dan sudah tercatat 2045 kasus terorisme yang terjadi. Kemudian di tahun 2018-2020 Indonesia-Filipina mulai memfokuskan kerjasama mereka dalam penanggulangan terorisme di kedua negara terutama pada aksi terorisme kelompok Abu Sayyaf.

Gerakan Abu Sayyaf di mulai pada 1991 kelompok ini merupakan sebuah kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam sebagai dasar kelompok ini, kelompok Abu Sayyaf berbasis di wilayah Basilan, Mindanao, dan Jolo. Pergerakan kelompok ini sangat sulit di tebak karna bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, gerakan kelompok Abu Sayyaf di filipina sendiri bisa dikatakan terang-terangan melakukan aksi dengan berperang melawan militer Filipina. Aksi yang membuat kelompok Abu sayyaf menjadi konsentrasi pemerintah Filipina dikarenakan membuat sebuah pengeboman di Davao city yang menewaskan 14 orang dan melukai 7 orang warga sipil, Presiden Filipina Duterte menyebut serangan ini merupakan aksi teroris. Setelah aksi yang gencar dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, Presiden Duterte

mengerahkan militer Filipina untuk menumpas kelompok ini namun malah membuat militer kewalahan, pada tanggal 29 Agustus 2016 ketika militer Filipina menjalankan operasi untuk penyisiran kelompok Abu Sayyaf namun membuat militer Filipina keteteran dengan memakan korban 15 anggota militer Filipina tewas dan 5 lainnya terluka dalam baku tembak dengan kelompok Abu Sayyaf di Patikulu, Sulu. Presiden Duterte menyebutkan bahwasanya kelompok separatis ini sangat berbahaya dan bukan hanya menjadi masalah domestik di Filipina saja namun juga masalah di Asia Tenggara (Ghofur, 2016).

Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam KTT ASEAN ke-31 menyoroti kasus terorisme, radikalisme dan ekstrimisme yang berkaitan dengan keamanan wilayah Asia Tenggara, Dengan hal lebih fokus terhadap hal di atas lebih bisa memetakan dan mengenal batasan agar kasus ini dapat disterilisasi di kawasan Asia Tenggara. Menteri luar negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi menyebutkan harus adanya pengamatan daerah-daerah yang mengganggu stabilitas seperti di Marawi sewaktu diduduki oleh kelompok teroris Abu Sayyaf. Kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dibentuk untuk meningkatkan kerja sama terhadap kasus terorisme di Asia Tenggara, dengan kata lain membuat sebuah tim Investigasi yang berpengalaman di aksi teror antara kedua belah pihak, atau pun membuat sebuah tim yang bertujuan untuk menghitung dan memperkirakan dampak sebuah aksi teror jika terjadi di ruang lingkup negara masing-masing dan kesiapan penanggulangan aksi teror tersebut dalam konteks domestik (Namora, 2016).

Dalam beberapa kasus mereka juga menculik WNI seperti yang terjadi 20 Maret 2016, 2 kapal Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina dan 10 WNI disandera, dalam penyanderaan tersebut kelompok Abu Sayyaf minta tebusan sekitar 14 miliar dengan tenggang waktu 1 minggu, dalam melakukan perundingan untuk pembebasan juru runding Indonesia yaitu Bapak Kivlan Zein berhasil melakukan perundingan dan akhirnya para WNI berhasil bebas. Kasus terbaru yang menelan korban nelayan WNI terjadi pada tanggal 1 oktober yang memakan korban, kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia agar lebih cepat dan tanggap dalam menanggulangi aksi teror. Kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi namun tidak menjadi konsentrasi pemerintah Indonesia sendiri dan seolah Indonesia lalai dalam penanganan sehingga memakan korban jiwa. Untuk menyelesaikan kasus-kasus teror seperti ini memang perlu diplomasi baik antara kedua belah pihak ataupun pihak ketiga agar kemungkinan terburuk tidak terjadi dan memakan korban serta hal-hal terburuk dapat diminimalisir (Wijaya, 2016).

Dalam jangka waktu 3 tahun saja di Filipina banyak terjadi kasus teror yang didalangi oleh kelompok teroris radikal muslim. Antara 2015 sampai 2017 saja terdapat 2045 kasus teror yang diantara semua kasus terafiliasi ke kelompok Abu Sayyaf, dalam hal ini kelompok Abu Sayyaf tidak melakukannya sendiri namun dengan kelompok yang berafiliasi langsung ke jaringan kelompok separatis yang lebih besar lainnya, MNLF (Moro National Liberation Front) , dan MILF (Moro Islamic Liberation Front), dalam jangkauan kasus terorisme di Filipina sendiri hampir 70% kasus teror di dalangi oleh kelompok Abu Sayyaf dan juga jaringan kelompok

besar yang berafiliasi langsung dengan kelompok Abu Sayyaf. Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan dari pemerintahan Filipina sendiri banyak melakukan pelacakan dan menangkap para pelaku aksi sebelum menjalankan aksi, namun ada juga yang melakukan perlawanan hingga meninggal dunia ketika sebelum menjalankan aksi (Nurhakim and Apriani 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Indonesia-Filipina dalam kontraterorisme kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi gerakan kelompok terorisme Abu Sayyaf di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Filipina.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja dan dampak dari kerja sama penanganan terorisme kelompok Abu Sayyaf antara pemerintah Indonesia dan Filipina.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah bagian dari kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada studi kerja sama Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi gerakan terorisme Abu Sayyaf di Asia Tenggara, dalam penelitian ini mengambil cakupan tahun 2015-2020 dikarenakan pada awalnya kasus ini yang belum menjadi prioritas antara kedua negara namun setelah beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Berlatar belakang pada tahun 2015 di mana kelompok Abu Sayyaf ini menyandera ABK kapal Indonesia dan dalam penanggulangannya kasus teror, dalam jangka waktu 2015-2017 saja tercatat 2045 kasus terorisme yang terjadi di Filipina dan kasus-kasus tersebut terafiliasi langsung ke kelompok Abu Sayyaf dan bahkan langsung dengan kelompok ISIS juga, dan dampak dari aksi yang kelompok ini berdampak pada keamanan sekitar perbatasan baik Filipina maupun Indonesia. Dinamika antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dalam melaksanakan kerja sama penanggulangan terorisme yang berfokus pada kelompok Abu Sayyaf pada hal ini Indonesia dan Filipina mulai lebih berkonsentrasi di mana pada tahun 2018-2020 Indonesia dan Filipina mulai mengoreksi kebijakan terdahulu dalam kerja sama antara kedua negara dengan harapan dapat mengoptimalkan kerja sama dalam penanganan terorisme, serta prospek untuk keamanan yang menjadi konsentrasi terbesar agar korban jiwa baik itu WNA maupun WNI bisa diminimalisasi oleh kedua belah pihak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah bagian dari kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada kontraterorisme dimana akan berfokus pada kerja sama Indonesia- Filipina dalam penanggulangan teroris kelompok Abu Sayyaf, salah satu literatur tersebut bertajuk *“Kerja Sama Indonesia-Filipina Dalam Menanggulangi Permasalahan Terorisme Jaringan Internasional Tahun 2017”* oleh Handi Aryana Meisandi, pada jurnal tersebut Handi Aryana Meisandi mengkaji tentang kerja sama Indonesia-Filipina terkait kerja sama dalam bidang terorisme, sebagian persetujuan kerja sama yang tertulis di nota kesepahaman antara Dewan Anti Terorisme untuk menanggulangi terorisme internasional. Selain itu Handi Aryana juga menjelaskan tentang pengembangan personal dalam penanggulangan terorisme dan untuk meningkatkan kemampuan antara lembaga penegakan hukum terkait antar dua negara, pendidikan dan pelatihan tambahan terkait kontraterorisme. Fokus utama jurnal yang ditulis oleh Handi Aryana sama dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada kerja sama Indonesia-Filipina dalam kontraterorisme (Meisandi, 2011-2014).

Literatur kedua yang menjadi tinjauan pustaka adalah jurnal. *“Efektivitas Joint Press Statement Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Indonesia-Filipina Pada Tahun 2017”* Vol 2 no.2 di mana literatur ini ditulis oleh M.Herry Misya pada tahun 2017 dimana pada literatur ini berfokus pada kerja sama Indonesia-Filipina dalam menanggulangi ancaman kelompok Abu Sayyaf namun, pada jurnal ini hanya berfokus pada sudut pandang terhadap kasus Indonesia saja dan lebih ke

sudut pandang tentang bagaimana penyelesaian kasus terhadap kepentingan Indonesia saja, namun penulis juga ingin membuat sudut pandang yang lebih berimbang juga dalam kepentingan counter terorisme yang juga dilakukan oleh Filipina juga dan diharapkan dapat melihat kasus ini dengan sudut pandang yang lebih berimbang antara kedua belah negara yang kerja sama (Misya 2017).

Literatur ketiga yang menjadi tinjauan pustaka adalah jurnal "*Kebijakan Keamanan Nasional Filipina Dalam Kontraterorisme 2017*" pada literatur ini yang ditulis oleh Erwin Yusup Sitorus lebih berfokus tentang bagaimana sikap dan kebijakan yang diambil Filipina dalam mengambil keputusan namun tidak dengan melakukan aksi terhadap pemberantasan kelompok terorisme di kawasan wilayah Filipina, diharapkan dengan kekurangan ini penulis akan memaparkan lebih dalam tentang bagaimana kebijakan Filipina dalam melakukan penanggulangan terorisme terutama di wilayah perbatasan Filipina dengan negara tetangga yang diisi oleh kelompok terorisme diharapkan penulis dapat menggambarkan dalam kategori aksi pemerintah Filipina dalam penanggulangan kelompok terorisme di Filipina itu sendiri (Sitorus 2017).

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan teori *Counter Terrorism* oleh Todd Sandler dalam buku "*The Routledge Handbook Of Terrorism Research karya Alex P.Schmid*" untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini. Bagaimana peran Indonesia-Filipina dalam kontraterorisme kelompok

Abu Sayyaf pada tahun 2015-2020? ,Teori ini cenderung lebih berfokus pada interaksi antara aksi dan kontra aksi, teori *counter terrorism* menurut Todd Sandler adalah sebuah tindakan pemerintah untuk menanggulangi serangan terorisme dan mengurangi ataupun membatasi konsekuensi dari serangan teroris. Kemudian dengan menggunakan teori *Counter Terrorism* yang ditulis oleh Todd Sandler akan dilakukan penelitian mengenai kerja sama kontraterorisme Indonesia-Filipina dalam melawan kelompok Abu Sayyaf. Dalam konteks internasional kontraterorisme dapat dilakukan dengan Langkah:

1. Kerja sama dalam Pelacakan aliran keuangan kelompok terorisme menjadi sangat penting dikarenakan untuk pembentukan kelompok maupun dalam menjalankan aksi terorisme pasti membutuhkan dana yang sangat banyak,dengan pelacakan aliran keuangan dan dapat mengetahui langsung siapa di balik otak aksi teror tersebut.
2. Pengembangan teknologi dalam kontraterorisme seperti salah satu contoh TFTP (*Terrorist Finance Tracking Programme*) dimana teknologi ini di kembangkan Amerika Serikat dan pernah di gunakan untuk melacak aliran dana dari kelompok Al-Qaeda.
3. Penguatan personil khususnya polisi dan militer dalam aksi kontraterorisme seperti pengembangan kemampuan dalam penanggulangan aksi teror
4. Memperkuat lembaga-lembaga terkait teroris dan memberikan pandangan kepada masyarakat internasional terkait terorisme dan memperbarui hukuman terhadap para pelaku aksi teror guan membuat efek jera

5. Membentuk kerja sama regional maupun secara internasional guna untuk berbagi informasi dalam kontraterorisme dengan beberapa faktor pendukung seperti:
 - Hubungan antara negara sasaran yang akan bekerja sama
 - Karakteristik negara yang akan bekerja sama
 - Sifat ancaman terorisme di lingkungan negara tersebut.
6. Pengelolaan media agar tidak ada penggiringan opini yang di buat-buat terkait aksi terorisme.

1.7 Argumen Sementara

Kerja sama Indonesia dengan Filipina dalam menanggulangi gerakan terorisme Abu Sayyaf tahun 2015-2020 dilakukan melalui cara-cara berikut. Pertama, kerja sama dalam pelacakan sumber pendanaan kelompok Abu Sayyaf, kedua Pengembangan teknologi dalam kontraterorisme, *ketiga* penguatan personil polisi dan militer dalam aksi kontraterorisme, ke empat penguatan lembaga-lembaga terkait teroris dan memperbarui hukuman terhadap para pelaku aksi teror dimana dalam pelaksanaannya juga mencakup penguatan lembaga-lembaga terkait dalam bidang penanganan terorisme dan pembaruan hukum terhadap para pelaku aksi terorisme guna untuk memberikan efek jera, ke lima kerja sama regional maupun internasional dalam penanganan kontraterorisme, yang terakhir pengelolaan media agar tidak ada penggiringan opini yang dibuat-buat terkait aksi terorisme.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menjelaskan data-data yang didapat dari berbagai macam tulisan dan karya ilmiah. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian menurut Lincoln dan Guba (Rukajat, 2018). Penelitian menggunakan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan semua data dan objek penelitian, kemudian dianalisis lalu dibandingkan dengan keadaan yang terjadi pada periode tertentu selanjutnya diberikan pemecahan permasalahan agar mendapatkan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah peran dan kerja sama Indonesia-Filipina dalam hal penanggulangan terorisme, Objek dari penelitian ini adalah kerja sama kelompok terorisme Abu Sayyaf.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi melalui pencarian data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian melalui

studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, website dan media massa yang berkaitan dengan judul dari penelitian. Data yang di dapat bersumber dari buku, artikel dan jurnal yang di dapatkan melalui akses internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Melalui studi kepustakaan, penulis melakukan beberapa langkah di antaranya:

- a) Pemilihan topik
- b) Eksplorasi informasi penelitian
- c) Mengidentifikasi fokus penelitian
- d) Pengumpulan sumber-sumber penelitian
- e) Persiapan penyajian penelitian
- f) Penyusunan laporan

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut

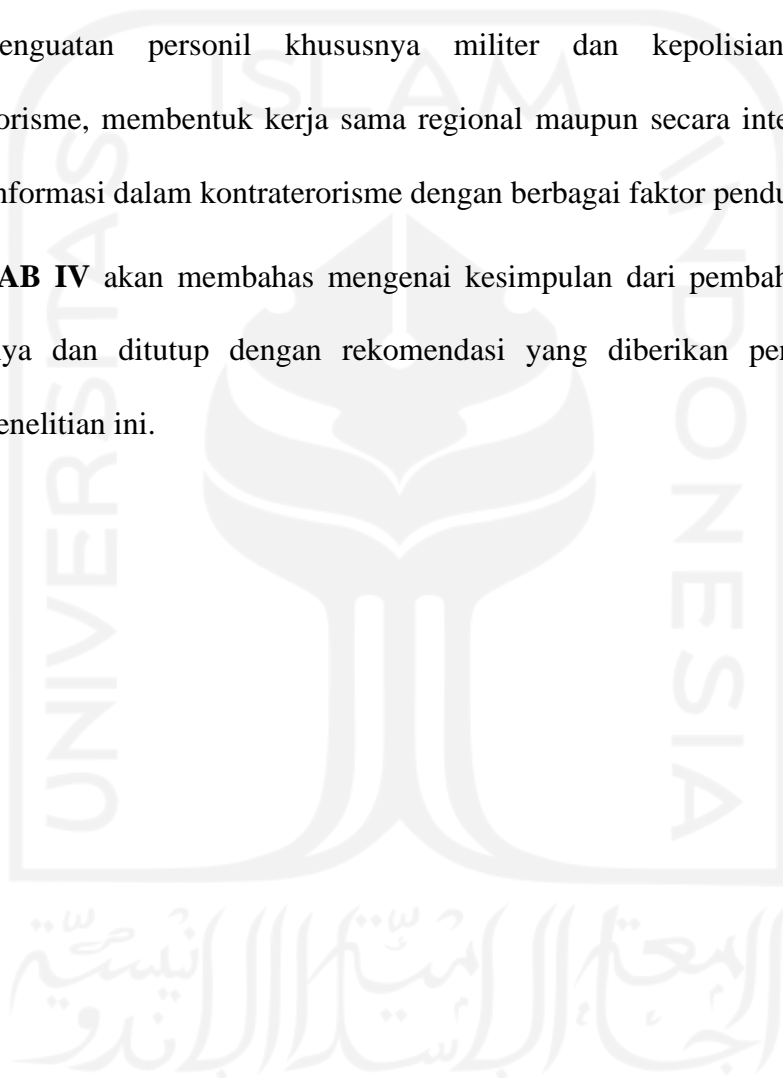
BAB I akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, tinjauan pustaka penelitian yang diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II akan mencakup data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian dalam melakukan analisis. Data-data tersebut tentang kebijakan kedua negara Indonesia dan Filipina dalam penanggulangan kasus terorisme, sejarah kerja

sama bilateral kedua negara, kerja sama ASEAN dalam penanggulangan teroris khususnya kelompok Abu Sayyaf.

BAB III akan menggambarkan tentang bagaimana penanganan terorisme, baik dari pelacakan dana, pengembangan teknologi dalam upaya penanggulangan aksi teror, Penguatan personil khususnya militer dan kepolisian dalam aksi kontraterorisme, membentuk kerja sama regional maupun secara internasional guna berbagi informasi dalam kontraterorisme dengan berbagai faktor pendukung.

BAB IV akan membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan ditutup dengan rekomendasi yang diberikan penulis berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KERJA SAMA KONTRATERORISME 2015-2020

2.1. Ancaman Abu Sayyaf di Filipina dan Indonesia

Sejak terjadi peristiwa 9/11 yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda membuat dunia internasional gempar dan aksi ini menjadi titik awal terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi selanjutnya di berbagai daerah di dunia. Setelah aksi 9/11 terjadi banyak kelompok terorisme yang melarikan diri ke kawasan-kawasan seperti Asia Selatan, dan bahkan ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri banyak muncul kelompok terorisme seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf Group (ASG), dan masih banyak kelompok-kelompok terorisme lainnya yang terafiliasi langsung ke kelompok besar seperti kelompok Abu Sayyaf, kelompok ini berbasis di sekitaran kepulauan selatan Filipina antara lain di daerah Jolo, Basilan, dan di Mindanao.

Abu Sayyaf merupakan kelompok teroris yang didirikan oleh Abdulrajak Janjalani yang merupakan anak dari tokoh ulama Basilan di Filipina. Pada tahun 1980-an Abdulrajak mengikuti pelatihan di kamp militer Afghanistan untuk melawan invasi dari pasukan dan masyarakat Uni Soviet bersama dengan pasukan Mujahidin Afghanistan. Kamp pelatihan tersebut dipimpin oleh panglima militer Mujahidin bernama Abdur Rab Rasul Sayyaf, namanya tersebut yang akhirnya digunakan Abdulrajak Janjalani untuk menjadi nama kelompok Abu Sayyaf sebagai bentuk rasa hormatnya kepada panglima militer tersebut (Wibisono 2016, 121). Tujuan utama

dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan menggunakan hukum-hukum syari'ah Islam sebagai otoritas moral dari undang-undang negara yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali (Wibisono 2016, 126).

Para kelompok teror yang ada di Asia tenggara juga terafiliasi ke kelompok-kelompok terorisme besar seperti Al-Qaeda dan juga ISIS, seperti pendiri kelompok Abu Sayyaf yaitu Abdurajak Abubakar Janjalani yang merupakan seorang veteran perang di Afghanistan dikatakan pernah bertemu Osama Bin Laden secara langsung dan diketahui berhubungan dengan sosok nomor satu di Al-Qaeda hal ini membuat Abdurajak Janjalani terinspirasi untuk mendirikan kelompok teroris Abu Sayyaf di Asia Tenggara dan bahkan dana utama dalam pembentukan kelompok Abu Sayyaf pada awal pembentukan berasal dari Al-Qaeda (Saptoyo 2021).

Memasuki era 2000an doktrin terorisme timur tengah makin kuat masuk ke Asia Tenggara tidak terkhusus di Indonesia saja namun juga ke Filipina, Malaysia, dan bahkan Singapura, doktrin teroris dari timur tengah berdampak besar terhadap pengaruh kepada kelompok teror yang ada di Asia Tenggara diaman semakin kuatnya kelompok-kelompok teroris yang ada di Asia Tenggara. Doktrin ini berasal dari para anggota kelompok teroris yang lari dari Afghanistan, Pakistan, dan Irak yang melarikan diri dari timur tengah yang semakin tidak menerima kelompok teroris hal ini membuat para terduga teroris melarikan diri ke Asia Tenggara hal ini membuat Asia Tenggara menjadi rumah kedua bagi kelompok teroris yang berhasil melarikan diri dari timur tengah, hal ini juga berdampak terhadap gaya gerilya para kelompok

teror yang semakin sulit diketahui oleh para pemerintah negara-negara yang ada di Asia Tenggara dalam penanggulangan terorisme (Winarno 2014).

Dengan anggotanya yang berjumlah ratusan orang, kelompok Abu Sayyaf telah melakukan berbagai penyerangan di Filipina. Sejak tahun 1991 hingga 2007, berbagai serangan bom yang menewaskan ratusan orang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Pengeboman MV Doulos di Zamboanga City, pemboman pesawat Philippines Airlines jurusan Manila-Tokyo, serangan granat ke sebuah pusat perbelanjaan di Zamboanga, serangan ASG di sebuah tempat wisata di Palawan Filipina, hingga ledakan bom di dekat markas militer Filipina di Zamboanga. (Rezky 2018, 1289).

Dalam ruang lingkup terorisme di Indonesia sudah sangat banyak aksi teror yang terjadi seperti bom Bali 1, bom Bali 2, Bom Jw marriot, dimana para kelompok teror ini terafiliasi langsung ke kelompok teror yang ada di Filipina dan Malaysia di mana jika ditarik benang merah semua kelompok yang ada di Indonesia terafiliasi langsung ke kelompok teror di Filipina, di mana kelompok terorisme di Indonesia seperti Jamaah Islamiah (JI) yang masih eksis di Sulawesi terafiliasi langsung ke kelompok Abu Sayyaf dimana kelompok Jamaah Islamiyah (JI) membeli persenjataan ke kelompok Abu Sayyaf. Dalam segi bisnis kelompok Abu Sayyaf sering melakukan penyelundupan di wilayah Kalimantan barat, dan pesisir sabah dimana, penyelundupan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf meliputi barang-barang keperluan sehari-hari guna menunjang kepentingan kelompok, selain itu bisnis dari kelompok Abu Sayyaf di Indonesia juga meliputi bisnis senjata dan juga

narkoba. Dalam kasus kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dimana kelompok ini sering berbisnis senjata dan amunisi dengan kelompok Abu Sayyaf yang diselundupkan via jalur laut dari Sulu ke Kalimantan barat lalu ke Sulawesi tengah dan tak jarang kelompok terorisme poso melakukan transaksi jalur laut untuk pembelian senjata tersebut (Gatra 2016).

2.1.1 Terorisme di Indonesia

Di Indonesia sendiri pergerakan kelompok teror cukup sulit untuk dilacak di dikarenakan para kelompok teroris bergerilya di masyarakat melalui Pendidikan agama dan juga menjadi guru spiritual hal ini membuat pihak kepolisian sangat sulit melacak keberadaan para kelompok teroris. Pada 14 maret 2017 tim Detasment Khusus 88 anti teror Polri berhasil menangkap terduga terorisme di kampung Inggris pare kabupaten kediri Jawa Timur dimana terduga teroris merupakan jaringan kelompok Abu Sayyaf yang bermukim di pare, terduga teroris bertugas untuk merekrut anggota baru dan akan dikirim ke Filipina selatan untuk mengikuti pelatihan militer dan setelah itu akan bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf (Syaefullah 2017).

Dalam pengembangan kasus ini Polri kembali berhasil menangkap 9 orang terduga teroris di Tolitoli dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dimana 9 terduga teroris memiliki afiliasi ke kelompok Abu Sayyaf yang ada di Filipina Selatan, dalam pengembangan kasus ini terduga kelompok ini akan melaksanakan aksi kekerasan terhadap petugas lapangan Polri maupun anggota TNI, dimana menurut mereka para

anggota TNI/Polri menjadi penghalang aksi dan dianggap sebagai pengacau, dalam aksi yang akan dilakukan terduga kelompok teroris akan merakit bom untuk meledakan dengan target para anggota TNI/Polri yang sedang bertugas, dari tangan kelompok ini polisi berhasil menyita beberapa barang bukti peracikan bom seperti belerang, paku, cairan spiritus, dan beberapa rompi yang digunakan untuk melancarkan aksi (Manalu 2017).

Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa kelompok teroris yang masih aktif hingga saat ini, yaitu:

1. Negara Islam Indonesia (NII)

Berkembang sejak kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 dan dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. NII juga dikenal dengan sebutan Darul Islam, kelompok ini menentang Pancasila sebagai dasar negara dan melakukan penyerangan terutama di wilayah Jawa Barat. Meskipun pemimpinnya telah ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962, namun jaringan teroris ini masih aktif hingga saat ini (Syarif 2021).

2. Jamaah Islamiyah (JI)

Jamaah Islamiyah dapat dikatakan sebagai keturunan dari NII. kelompok teroris ini dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar yang merupakan bagian dari NII KW (Komandemen

Wilayah) II, Jawa Tengah. Jaringan ini dibentuk pada tahun 1993 di Malaysia dan dipercaya sebagai dalang dibalik serangan Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriot Jakarta (Syarif 2021).

3. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Sama seperti jaringan sebelumnya, jaringan teroris MMI juga didirikan oleh Abu Bakar Bassyir. Jaringan MMI terafiliasi dengan jaringan terorisme Al Qaeda di Suriah dan Front Al-Nusrah. MMI kemudian berubah nama menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) (Syarif 2021), yang nantinya akan melahirkan beberapa kelompok terorisme lainnya, seperti:

- Jamaah Ansharut Khilafah (JAK)
- Jamaah Ansharut Syariah (JAS)
- Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

4. Anshor Daulah

Kelompok teroris yang melakukan pengeboman di Surabaya dan Makassar. Pada tahun 202, tim Densus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 12 anggota kelompok teroris ini (ANTARASULTRA 2022).

2.1.2 Terorisme di Filipina

Filipina mengecam kegiatan brutal yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf, jaringan kelompok Abu Sayyaf di Filipina dapat dibagi menjadi beberapa fase kepemimpinan yaitu:

a) Fase Kepemimpinan Abdurajak Abubakar Janjalani

Pada fase kepemimpinan Abdurajak Abubakar Janjalani kelompok Abu Sayyaf memiliki doktrin yang lebih mendekati ke doktrin kelompok Al-Qaeda dimana, Abdurajak Abubakar Janjalani menjadi orang dekat Osama bin Laden yang mencantumkan doktrin tentang seluruh kelompok teroris yang berbasis agama islam untuk menyerang semua kaki tangan Amerika Serikat baik dalam kesamaan agama, politik, dan maupun budaya. Dari doktrin ini Abdurajak Abubakar Janjalani melakukan aksi atas dasar kesetian terhadap agama islam dan kesetian terhadap pemimpin besar Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden, dalam tekad yang di anut oleh Abdurajak Abubakar Janjalani untuk mendirikan negara islam kelompok Abu Sayyaf menolak otonomi, menolak kemerdekaan, dan menolak reformasi. Dalam melakukan pergerakannya kelompok Abu Sayyaf melakukan pengeboman dengan tujuan warga sipil yang beragama Kristen dan katolik di gereja-gereja saat menjalankan ibadah dengan tujuan untuk mendirikan negara islam (Fellman 2011).

b) Fase Kepemimpinan Khadaffy Janjalani

Pasca meninggalnya Abdurajak Abubakar Janjalani pada tahun 2001 kelompok Abu Sayyaf dipimpin oleh Khadaffy Janjalani yaitu adik kandung dari Abubakar Janjalani namun di era kepemimpinan Khadaffy Janjalani kelompok Abu Sayyaf terpecah menjadi dua faksi dan juga dikarenakan adanya dualisme yang menyebutkan Khadaffy tidak memiliki Pendidikan militer yang memadai yang pada akhirnya muncul faksi baru di kepemimpinan Galib Andang atau dikenal sebagai Commander Robot, dalam kelompok Khadaffy Janjalani yang pada awalnya kelompok Abu Sayyaf yang pada awalnya ingin membentuk negara Islam yang memerangi pemerintah malah bertransformasi menjadi kelompok kriminal, di akhir kepemimpinannya Khadaffy Janjalani melakukan pengeboman Bersama faksi Galib Andang yang sempat berselisih paham, dalam aksi yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini memakan korban jiwa 48 orang tewas dan 116 luka-luka. Khadaffy Janjalani tewas ketika operasi militer yang dilakukan oleh tim gabungan Amerika Serikat dan militer Filipina. (Fellman 2011)

c) Fase Kepemimpinan Galib Andang atau dikenal sebagai Commander Robot

Di faksi ini tak berbeda jauh dengan kelompok pimpinan Khadaffy Janjalani dimana kelompok Abu Sayyaf faksi Galib Andang melakukan aksi kriminal seperti melakukan penculikan terhadap kurang lebih 140 orang yang di culik dan juga pengeboman yang dilakukan di bandara Davao City yang memakan korban jiwa sebanyak 48 orang dan 116 lainnya luka-luka, setelah aksi tersebut Galib Andang

berakhir di tewas dalam operasi militer Amerika Serikat dan militer Filipina. (Fellman 2011).

d) Fase Kepemimpinan Isnilon Totoni

Dalam fase kepemimpinan Isnilon Totoni hingga tahun 2017 Kelompok Abu Sayyaf mengikrarkan janji untuk tunduk pada kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau lebih dikenal ISIS di karenakan Isnilon Totoni yang merupakan ketua kelompok ISIS cabang Filipina, Kelompok Abu Sayyaf di era Isnilon Totoni mulailah marak kembali aksi penculikan dan penyanderaan warga negara asing yang berada di perairan Filipina, dalam melancarkan aksi nya kelompok Abu Sayyaf mengincar target acak yang berada di daerah kekuasaan mereka baik para turis mancanegara, nelayan, kapal-kapal pengangkut batu bara, dan bahkan warga sipil sekaligus, dalam aksi nya kegiatan kelompok Abu Sayyaf mulai melakukan kegiatan yang mirip dengan kelompok ISIS seperti melakukan pembunuhan sandera, melakukan aksi penggorokan dan di rekam untuk menyebarkan teror bahwasanya kelompok Abu Sayyaf masih eksis (Fellman 2011).

Dalam segi pendanaan kelompok Abu Sayyaf bisa dikatakan memiliki pemasukan tetap, dilihat dari pajak keamanan yang diberikan masyarakat kepada kelompok Abu Sayyaf yang bermukim di Filipina selatan, bisnis lain yang dilakukan seperti perdagangan ganja ke wilayah Taiwan dan beberapa daerah china membuat pendanaan kelompok Abu Sayyaf lebih teratur dan cenderung lebih mandiri untuk dana dalam melancarkan aksi. Dalam 2015 perubahan bentuk gerakan kelompok Abu

Sayyaf di Filipina mulai berubah yang awalnya berlandaskan ideologi namun sekarang menjadi kelompok kriminal berprofit mulai dari penyanderaan dengan meminta tebusan, perampokan bank dan penyerangan terhadap anggota polisi/militer (Permono 2019). Dalam ruang lingkup Asia Tenggara kelompok Abu Sayyaf bergerak dengan kelompok-kelompok kecil yang terafiliasi di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia dan, Singapura.

2.2 Kerja sama Indonesia-Filipina di Bidang Kontraterorisme

Indonesia dan Filipina yang merupakan sama-sama negara kepulauan, yang mayoritas etnis hampursama yaitu etnis keturunan Austronesia, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Filipina sudah di mulai sejak 1949 dimana Indonesia sudah membangun kantor konsulat (kantor perwakilan) di Manila, hal ini menjadi keputusan yang baik terhadap hubungan diplomatik antara kedua negara pasca kemerdekaan kedua negara, berbagai penyelesaian sengketa yang terjadi di selesaikan dengan hubungan diplomatik yang baik, secara resmi Indonesia dan Filipina menandatangani kesepakatan dalam beberapa kerja sama seperti Ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan lintas negara. Dalam kerja sama di bidang counter terorisme Indonesia dan Filipina terdapat sebuah kepentingan obyektif antara kedua negara yaitu, keamanan dan counter terorisme yang terjadi di perbatasan kedua negara dimana dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Polri (*Polisi*

Republik Indonesia) dan KNF (*Kepolisian Nasional Filipina*) dimana dalam nota kesepahaman kerja sama ini berisi tentang kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan nota kesepahaman antara BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Republik Indonesia dengan Dewan Anti terorisme Filipina yang pada nota kesepahaman ini berisi tentang kerja sama tentang memerangi terorisme. Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Filipina memiliki tujuan yang sama dan dengan sasaran kerja sama yang sama pula yaitu mengenai terorisme, dimana terorisme yang berada di Filipina yaitu kelompok Abu Sayyaf yang bergabung dengan jaringan JI (Jemaah Islamiyah) yang berada di Sulawesi dan juga para pendiri kedua kelompok pernah sama-sama menempuh Pendidikan yang sama di Afghanistan dan sebagai akibat adanya interdependensi antara Indonesia dan Filipina memiliki masalah yang sama maka untuk mengatasi tidak gerakan kelompok teroris Indonesia dan Filipina melakukan kerja sama dalam penanggulangan teroris (Meisandi 2011).

Dalam kurun waktu 2015-2016 terjadi kasus penyanderaan sebanyak 8 kali yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yang menyandera WNI dan 13 lebih kasus penyanderaan WNA/turis mancanegara yang datang berlibur ke Filipina, dalam pembebasan WNI yang dilakukan oleh militer Indonesia bekerja sama dengan pemerintahan Filipina beberapa kali berhasil membebaskan sandera melalui diplomasi dan ada juga melalui tebusan, dalam kerja sama ini Indonesia dan Filipina melakukan kerja sama khusus dimana kedua negara melakukan pemetaan tentang seberapa efisien tindak pembebasan sandera yang dilakukan oleh pemerintahan

Indonesia, Filipina sebagai tuan rumah memberikan gambaran kepada pemerintahan Indonesia bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan dari kelompok Abu Sayyaf dalam melaksanakan kegiatan pembebasan WNI dimana dalam kasus ini Indonesia melakukan Diplomasi total dan menggap kerja sama ini memang berhasil guna untuk menjaga WNI agar tidak menjadi korban dari kelompok Abu Sayyaf (Getty 2016).

Selain kerja sama dalam pembebasan sandera kerja sama Indonesia dan Filipina yang bertajuk *The Joint Working Group "(JWG)" on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* dalam kerja sama yang sudah berlangsung dalam 4 tahun terakhir, kegiatan JWG merupakan kegiatan kerja sama yang dibahas setiap tahun nya, dalam kerja sama ini kedua belah pihak membahas tentang pertukaran pandangan mengenai ancaman keamanan regional, domestic, dan global, tak hanya membahas tentang terorisme domestik saja, dalam kerja sama JWG ini juga membahas terorisme di dunia siber yang setiap tahun nya meningkat hal ini dipicu dengan berbagai propaganda yang kerap dilakukan oleh para kelompok teror di dunia maya, tak hanya itu saja terorisme di dunia siber juga sering merekrut para anggota lewat game dan bahkan sosial media, hal ini juga menjadi pembahasan yang cukup menyita banyak perhatian dari kedua negara. Filipina sebagai negara kepulauan seperti Indonesia juga meminta untuk ada nya kerja sama dengan cara pelatihan kontra aksi terorisme untuk personil polisi dan militer yang di rasa masih kurang cakap dalam melakukan kontraksi dan diharapkan dengan adanya latihan militer dan pengembangan skil terhadap militer/polisi Filipina diharapkan setidaknya

dapat meminimalisir kerusakan dan bahkan mengurangi korban jiwa dikarenakan SDM militer Filipina belum memiliki pengalaman yang memadai seperti militer yang ada di Indonesia, dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mengembangkan manajemen aksi dan kontra aksi ketika terjadi serangan teroris di Filipina (BNPT 2022).

BAB III

PERAN INDONESIA DAN FILIPINA DALAM KONTRATERORISME

Pasca kejadian penyanderaan ABK kapal Tunda TB Brahma 12 yang terjadi pada 2016 silam, dapat membuka babak baru terkait kasus terorisme yang terjadi di Asia Tenggara, dimana kelompok terorisme di Asia Tenggara mulai melakukan aksi secara terang-terangan, hal ini membuat kawasan Asia Tenggara menjadi rumah kedua bagi kelompok-kelompok teroris yang melarikan diri atau lebih dikenal kelompok alumni perang Afghanistan, Iraq dan alumni negara perang di Timur Tengah yang mencari suaka untuk berjuang kembali atau lebih dikenal dengan kata “jihad” menurut mereka. Kelompok-kelompok terorisme yang rata-rata terafiliasi ke

kelompok terorisme yang berada di Timur Tengah seperti contoh kelompok Abu Sayyaf yang terafiliasi langsung ke Al-Qaeda dan beberapa kelompok lain seperti ISIS yang berada di timur tengah, hal ini membuat stigma buruk bagi kawasan Asia Tenggara yang menjadi rumah kedua bagi para kelompok terorisme.

Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup berhasil mengatasi kasus terorisme walaupun dalam lingkup domestik, mampu membuat Indonesia menjadi negara yang meningkatkan perkembangan terkait penanggulangan terorisme tersebut, dikarenakan oleh ada banyak kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang sangat serius di bidang counter terorisme selain kerja sama antara Indonesia dan Filipina. ASEAN juga melakukan kegiatan kerja sama dalam penanganan terorisme dengan para negara anggota di mana dalam kerja sama yang bertajuk *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* dimana dalam pakta kerja sama ini meliputi kerja sama antar seluruh negara anggota ASEAN maupun negara pendukung di luar ASEAN, ACCT menjadi inisiatif untuk melawan terorisme di kawasan regional Asia Tenggara guna menjaga keamanan di perbatasan masing-masing negara anggota. (Felix Ferdin Bakker 2020).

Kelompok Abu Sayyaf yang awalnya merupakan kelompok separatis yang berjuang untuk ideologi dengan tujuan pembebasan dan pembentukan negara di Filipina selatan, dimana di Filipina selatan terdiri dari etnis bangsa Moro yang mayoritas etnis ini memeluk agama islam yang taat dan pembentuk perlawanan terhadap pemerintahan Filipina, hal ini mengakibatkan ketegangan yang makin memanas, pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok separatis yang akhirnya

berubah menjadi kelompok teroris yang secara keras melawan pemerintahan Filipina lewat aksi teror pengeboman, penyerangan terhadap militer dan polisi Filipina.

Filipina sebagai negara berdaulat juga menjalin kerja sama dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dalam counter terorisme kelompok Abu Sayyaf, dalam perspektif Filipina dan Amerika Serikat terkait kelompok Abu Sayyaf yang mengancam keamanan global, hal ini dikarenakan Amerika Serikat sebagai anggota PBB merasa Filipina sebagai sekutu dan juga dalam memperkuat kerja sama secara global dan juga Amerika Serikat menganggap Filipina sebagai target *Global War on Terrorism* (GWOT), hal ini dikarenakan kelompok Al-Qaeda yang merupakan musuh terbesar Amerika Serikat yang terafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf menampung para anggota Al-Qaeda yang melarikan diri ke Filipina, dan juga Amerika Serikat ingin membuat keamanan nasional bagi para warga negara AS yang ada di Filipina (Nurhakimi 2017).

3.1 Kerja Sama dalam Pelacakan Sumber Pendanaan Kelompok Abu Sayyaf

Pendanaan terorisme atau lebih dikenal dengan penyedia dukungan keuangan dimana penyedia dana bisa berasal dari lembaga yang sah seperti dari organisasi tertentu, individu ataupun dari dana dari hasil kejahatan (*Proceeds Of Crime*), Pada dasarnya sumber pendanaan kelompok terorisme berasal dari sumber yang sangat banyak dan cukup sulit di tebak, kelompok Abu Sayyaf yang merupakan aktor dalam penelitian ini saja memiliki beberapa sumber dana yang cukup dalam melancarkan aksinya, sebagai contoh pada awalnya kelompok Abu Sayyaf dibentuk dengan

sumber dana berasal dari kelompok Al-Qaeda, hal ini terjadi dikarenakan adanya kedekatan antara kedua pemimpin kelompok. *Abdurajak Abubakar Janjalani* yang merupakan founder pembentuk kelompok Abu Sayyaf sekaligus sebagai pemimpin dari kelompok Abu Sayyaf yang merupakan mantan pejuang perang di Afghanistan yang memiliki kedekatan dengan pemimpin Al-Qaeda yaitu *Osama Bin laden*, Al-Qaeda sebagai kelompok yang besar pada masa itu menggelontorkan dana yang cukup besar dengan nominal US\$ 6 Juta kepada kelompok Abu Sayyaf hal ini membentuk jalinan tersendiri antara kedua belah pihak kelompok organisasi termasuk antara kedua pemimpin organisasi teror tersebut, dengan kata lain Al-Qaeda juga dalang sebagai aktor utama dalam pembentukan kelompok Abu Sayyaf (Fuad 2016).

Indonesia dan Filipina melakukan kerja sama dalam pelacakan sumber dana dari kelompok Abu Sayyaf, dalam kerja sama yang melibatkan (*Bank Indonesia*) BI dengan (*Banko Sentral Ng Filipina*) BSP kerja sama ini dilaksanakan pada 4 Agustus 2018 dengan penandatanganan (*Memorandum of Understanding*) MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam kerja sama ini dengan pedoman yang digunakan adalah (*Financial Action Task Force*) FATF. FATF sendiri adalah badan atau lembaga yang dibentuk menteri yurisdiksi internasional yang bertujuan untuk membuat standar dan hukum dalam mengimplementasikan untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi, dan juga ancaman lain yang terkait dengan sistem keuangan internasional melalui Prinsip KYC (*Know Your Customer Principle*), Prinsip KYC sendiri adalah identifikasi nasabah, dimana

proses identifikasi data nasabah sebagai salah satu implementasi Prinsip KYC, dalam implementasi Prinsip KYC dilakukan pada nasabah individual (*individual customer*) diharapkan dengan prinsip ini dapat melacak ataupun membatasi pergerakan financial kelompok teroris (Financial Action Task Force 2022).

Bank Indonesia dan Bank Sentral Ng Filipina yang melakukan kerja sama dengan menandatangani (*Memorandum of Understanding*) MoU ini ditandatangani pada tahun 2018 dalam (*Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*) APU PPT mencegah adanya pencucian uang dan pendanaan teroris dimana, dalam kerja sama ini berfokus pada sistem pembayaran dan transaksi keuangan dan juga bentuk pembayaran di luar mata uang negara/Bitcoin hal ini dilakukan karena kebanyakan sumber pendanaan dari luar negeri juga menggunakan mata uang digital yang tidak tercantum dari pengiriman dana tersebut, selain itu PPATK juga bekerja sama dengan *Anti Money Laundering Council* (AMLC) yang merupakan unit intelijen pencucian uang milik Filipina dalam kerja sama ini meliputi beberapa faktor terkait seperti pertukaran informasi dan pengawasan bank yang berfokus pada transaksi dan pembayaran keuangan, data, dan juga pengembangan sumberdaya manusia, dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memerangi, mencegah dan menekan pergerakan pendanaan terorisme yang ada di perbatasan Filipina dan Indonesia khususnya kelompok Abu Sayyaf.(Marten 2022)

Dari kerjasama yang dilakukan oleh AMLC Filipina dan PPATK Indonesia, penanggulangan aksi terorisme di kedua negara dapat terlaksana dengan baik akibat kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan lokal maupun internasional. Dan

melalui wawancara dengan VIVANews, ketua PPATK Indonesia memaparkan bahwa aliran pendanaan untuk terorisme sampai April tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun lalu (2018). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah laporan yang masuk, sampai April 2018, jumlah laporan yang masuk sudah berjumlah 388 laporan, dan sampai Desember 2018 terhitung ada 840 laporan yang masuk. Sedangkan sampai bulan April 2019 jumlah laporan yang masuk hanya berjumlah 172 laporan (Pratiwi, Putranti, and Hanura 2022, 622). Meskipun tidak didapatkan data pasti mengenai masuknya jumlah dana dan dari untuk siapa dana tersebut ditujukan, namun laporan tersebut sudah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan kerjasama Indonesia-Filipina dalam melakukan pelacakan dana terorisme. Dalam kerjasama ini mendapat data hasil transaksi sebanyak 517 data dari hasil pelacakan dana keuangan yang berasal dari perorangan, maupun dari lembaga koperasi yang dikelola oleh para anggota kelompok terorisme yang terafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf, aliran dana berasal luar negeri dan juga beberapa berasal dari Indonesia, namun untuk penangkapan juga sudah ada dilakukan beberapa namun kebanyakan ketika penangkapan para pelaku melakukan perlawanan hingga terjadi kontak senjata. (ANTARASULTRA 2022).

3.2 Pengembangan Teknologi dalam Kontraterorisme

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada hal-hal positif baik di bidang ekonomi, medis dan berbagai hal, namun pengembangan teknologi juga berdampak di bidang negative hal ini dikarenakan pada era teknologi 4.0 yang mudah di akses dan juga perkembangan teknologi yang semakin massif.

Kelompok teroris juga menggunakan teknologi yang dapat di akses dengan mudah, dalam pengembangan teknologi ini pula berbagai macam teknologi di kembangkan guna untuk menghadapi aksi maupun kontra aksi yang dilakukan oleh kelompok terorisme baik yang mencakup dalam ruang lingkup internasional, regional, maupun dalam ruang lingkup nasional negara yang bersangkutan, Indonesia dan Filipina khususnya yang menjadi dua negara yang bekerja sama dalam penanggulangan kelompok terorisme Abu Sayyaf juga mengikuti perkembangan teknologi guna dalam penanganan aksi maupun kontra aksi dalam penanganan kelompok terorisme. (Nur Qalbi 2020)

Dalam pengembangan teknologi khususnya dalam bidang terorisme pemerintah Indonesia-Filipina masih berfokus pada pengembangan teknologi dalam pelacakan dana keuangan dikarenakan menurut kedua belah pihak pendanaan adalah hal utama bagi kelompok terorisme melakukan aksi, pengembangan teknologi di bidang lain seperti militer masih berjalan sangat minim yang hanya meliputi teknologi persenjataan, dan dalam pengembangan pelacakan dana terorisme yang dilakukan oleh kedua negara, dalam pelacakan dana kedua bank sentral negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Ng Filipina (BSP), dalam kategori kerja sama di bidang keamanan syber masih dalam pengembangan software dan pengamatan media yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepolisian dan , hal ini berguna untuk dapat menekan perkembangan paham radikalisme melalui media massa dan dunia maya (Simbolon 2016).

Dengan berkembangnya teknologi yang ada, menjadi pedang bermata dua bagi dunia. Kemudahan mengakses berbagai hal membuat tindak terorisme juga semakin mudah tersebar. *Cyber terrorism* merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan penggunaan jaringan komputer untuk mematikan infrastruktur nasional, mengganggu dan mengintimidasi suatu pemerintahan atau warga negara (Qalbi, Miranda, and Yulianti 2020, 109). Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi, harus diimbangi dengan segala bentuk tindak pencegahan kejahatan *cyber*.

3.3 Penguatan Personil Polisi dan Militer dalam Aksi Kontraterorisme

Dalam penanggulangan terorisme yang melibatkan berbagai lembaga yang berkecimpung dalam penanggulangan terorisme di suatu negara, dalam hal penanggulangan terorisme juga memerlukan lembaga atau institusi penegak hukum dan bahkan jika diperlukan institusi militer juga ikut dalam penanggulangan aksi maupun kontra aksi teroris yang sedang terjadi di lapangan. Dalam penanganan aksi terorisme yang sedang terjadi dan akan diturunkan para personel dengan kemampuan khusus dalam bidang anti teror baik dari kepolisian maupun detasmen anti teror dari militer (Rezky 2018). Penguatan personil yang lebih berfokus pada pengembangan *soft skill* dimana dalam pengaplikasian nya diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa ketika adanya aksi terorisme yang terjadi, hal ini mencakup beberapa aspek yang di bekali terhadap pengetahuan para personel anti teror yang ada di lapangan. Dalam kerja sama Indonesia dan Filipina dalam bidang kontraterorisme

kedua negara menyepakati tentang kerja sama dalam pengembangan skil tempur polisi/militer dalam menghadapi aksi teror (Rezky 2018).

Kerja sama Indonesia dan Filipina dalam penanggulangan teroris sudah berjalan bertahun-tahun dimana dalam kerja sama ini kedua belah negara saling membantu dalam pengembangan sumberdaya manusia, dalam kerja sama ini kedua Negara telah menandatangani *The Joint Understanding Between The Indonesia National Forces (TNI) and The Armed Forces of The Philippines (AFP)* yang ditandatangani tahun 2012, namun pada pengaplikasian kerja samaini di mulai pada 2014 dan setiap tahun nya terus di evaluasi, setelah kejadian pembajakan kapal TB Brahma 12 yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan sulu pada 2016 kegiatan kerja sama ini kembali di evaluasi secara besar-besaran oleh panglima angkatan bersenjata kedua negara. Dalam ruang lingkup bidang intelijen, faktor perbatasan opslat dan diklat *service to service group* dimana dalam kerja sama bidang militer ini akan berfokus pada kerja sama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan khususnya kepada prajurit bintara dan tamtama dan mengirimkan tenaga tekhnis atau pelatih dalam pengembangan skil anti teror seperti pengembangan penguasaan medan, persenjataan masing-masing negara, mental dan patroli kapal di masing-masing perbatasan negara, kerja sama ini cukup penting dikarenakan setiap negara memiliki pandangan militer yang berbeda-beda dan diharapkan dengan adanya kerja sama ini kedua negara dapat lebih aktif dalam penanggulangan terorisme, pada 2016 kerja sama ini kembali di evaluasi dan juga keikut sertaan Malaysia dalam kerja sama antara militer dimana diharapkan dengan adanya

Malaysia dapat meminimalisir kegiatan terorisme yang ada di Asia Tenggara terkhusus di wilayah perbatasan selat malaka, maupun di perbatasan laut sulu (Rezky 2018).

Dalam bidang keamanan siber juga melibatkan antara kedua pihak kepolisian, Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan PNP (*Philippine National Police*) kerja sama ini disepakati pada tahun 2016 ketika pertemuan antara Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan pelatihan bersama dalam rangka menambah peningkatan kemampuan kedua lembaga kepolisian dengan kerja sama *police to police*, dalam pelatihan teknis meliputi skil dalam bidang persenjataan di masing-masing negara, mental psikologi, pengembangan software dan pengamatan media, hal ini berguna untuk dapat menekan perkembangan paham radikalisme melalui media massa dan dunia maya, secara garis besar kerja sama diharapkan dapat menambah kemampuan dari kedua belah pihak lembaga kepolisian, dalam bidan taktis seperti taktik perang dalam kota ataupun sabotase juga menjadi konsentrasi kedua belah pihak lembaga kepolisian hal ini guna memperkuat detasmen anti teror di masing-masing lembaga kepolisian.

Selain penguatan untuk anggota polisi dan tentara, sistem keamanan baru juga sudah diterapkan sebagai peningkatan upaya pencegahan terorisme di Indonesia dan Filipina. Terdapat beberapa implementasi kerjasama yang telah dilakukan kedua negara untuk mencegah terorisme, diantaranya (Rezky 2018, 1292-1294):

1. Patroli laut

2. Patroli udara
3. Melakukan *Quick Respond*
4. Membentuk pos komando maritim
5. Kelompok kerja patroli maritim
6. Koridor transit di wilayah maritim sebagai jalur laut
7. Informasi dan pembagian intelijen, serta berbagi mekanisme database trilateral
8. Membentuk *Hotline Communication*

3.4. Penguatan Lembaga-Lembaga Terkait Teroris dan Memperbarui Hukuman terhadap Para Pelaku Aksi Teror

3.4.1 Penguatan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Bidang Penanganan Terorisme

Dalam upaya penguatan lembaga pemerintahan terkait dalam penanggulangan teroris, pemerintah Indonesia dan Filipina sudah menyepakati kerja sama di bidang ini dengan beberapa kesepakatan terkait dimana salah satu bentuk kerja sama dalam hal penguatan lembaga-lembaga dalam penanganan terorisme, terdapat pada kesepakatan *Joint Working Group "(JWG)" on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* tahun 2017 kedua belah pihak sepakat dengan beberapa faktor kerja sama yang meliputi pertukaran informasi intelijen, penguatan lembaga yang menangani terorisme, kerja sama antar lembaga kepolisian, penanggulangan terorisme di dunia siber, dan juga kerja sama dalam meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas terhadap lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan terorisme. Dalam upaya memperkuat lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang penanggulangan teroris Indonesia dan Filipina melakukan kerja sama di berbagai macam bidang dan juga melibatkan lembaga militer, intelijen, perbankan dan juga lembaga penanganan khusus terorisme yang ada di masing-masing negara, dalam hal ini penguatan lembaga meliputi pembekalan terhadap para anggota/pegawai tentang deradikalisasi maupun pengembangan teknologi dalam upaya penanggulangan terorisme. (BNPT 2022).

Dalam *Frist Joint Working Group "(JWG)" on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia pada tahun 2017* beberapa lembaga dari masing-masing negara yang terkait dalam penanggulangan teroris hadir dimana dari pihak pemerintahan Indonesia seperti kemenkopolkam, BIN (*Badan Intelijen Nasional*), PPATK (*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*), Kejaksaan RI (*Kejaksaan Agung Republik Indonesia*), Bakamla RI (*Badan Keamanan Laut Republik Indonesia*), Kemenkumham RI (*Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*), BSSN RI (*Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia*) dan dari pihak Filipina NICA (*National Intelligence Coordinating Agency*), ALMC (*Anti-Money Laundering Council*), BI (*Bureau of Immigration*), *Anti-Terrorism Council Program Management Center (ATC-PMC)*.

Dan salah satu lembaga yang bekerjasama adalah PPATK Indonesia dan ALMC Filipina. Kedua lembaga tersebut bekerjasama dalam program pelacakan pendanaan terorisme serta pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok terorisme

di Indonesia-Filipina. Dalam pembahasan penguatan lembaga-lembaga anti terorisme meliputi penangan dan pencegahan dunia siber yang makin maju dengan adanya pertemuan di tiap tahun nya diharapkan dapat meningkatkan kerja sama penguatan dan peningkatan kapabilitas di masing-masing lembaga anti terorisme dan deradikalisasi dengan harapan dapat membatasi gerak kelompok terorisme baik kelompok Abu Sayyaf ataupun kelompok-kelompok yang berafiliasi langsung dengan kelompok Abu Sayyaf kegiatan pertemuan ini sudah berjalan dari sejak tahun 2018 dan tiap tahun nya pertemuan ini selalu di improvisasi setiap tahun nya agar kekurangan dari kerja sama ini dapat diperbaiki dan menghasilkan kebijakan yang diharapkan serta dapat menekan kegiatan kelompok terorisme khususnya kelompok Abu Sayyaf. (BNPT 2022)

3.4.2 Pembaruan Hukum terhadap para pelaku Aksi terorisme

Setiap negara memiliki hukum yang diatur oleh perundang-undangan baik hukum pidana maupun perdata, dalam konteks kejahatan transnasional seperti terorisme yang menjadi salah satu kejahatan luar biasa dan mengancam semua pihak di suatu wilayah, yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan pada awalnya traktat ini dijejaki oleh Malaysia pada ASLOM (*ASEAN Senior Law Official Meeting*) di Bangkok Thailand pada tahun 2002 ,dan pada akhirnya traktat ini di prakarsai oleh Malaysia pada tahun 2004 dan penandatanganan keanggotaan Myanmar serta Thailand dalam MLAT (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty*) dalam pengaplikasian nya MLAT mulai berlaku pada tahun 2013 dengan semua prosedur hukum internal negara-negara anggota ASEAN ,dalam hal terorisme setiap pelaku

akan di hukum sesuai dengan hukum di wilayah para kelompok terorisme melakukan aksi, namun kebijakan hukum di wilayah ASEAN sudah diatur melalui MLAT (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty*) dimana dalam kebijakan ini mengatur tentang meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan tindak pidana yang melalui kerja sama dan dalam bantuan hukum timbal balik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam permasalahan hukum pidana, traktat ini bertujuan untuk dapat mengantisipasi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara (ASEAN 2004).

Dalam kebijakan yang diatur dalam MLAT mengatur tentang dimana para terpidana wajib mengikuti dan tunduk terhadap hukum domestik di negara tempat terpidana terorisme tertangkap. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa teroris negara terpidana terorisme hanya bisa membantu dengan cara menempatkan penasihat hukum dan negara bersangkutan tidak memiliki wewenang terhadap terpidana terorisme sama sekali, dalam traktat MLAT sudah mengatur beberapa kebijakan baik dalam hukum maupun upaya ekstradisi yang sudah disepakati oleh para anggota ASEAN dalam MLAT.

Indonesia dan Filipina memiliki persamaan dan perbedaan tindak sanksi hukum pidana dimana hal ini menjadi kebijakan masing masing negara dalam menghukum pelaku terorisme yang tertangkap melakukan aksi terorisme, tindak pidana terorisme di Indonesia diatur, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan dalam undang-undang ini beberapa memuat beberapa materi yang di ubah di antara nya:

- a. Berbagai kriminalisasi baru tindak pidana terorisme seperti bahan peledak, mengikuti latihan militer/ kegiatan pelatihan paramiliter selain angkatan bersenjata resmi baik dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- b. Pemberian sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik pemufakatan jahat, persiapan mencakup penyedia senjata, alat peledak, dan pembantu untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- c. Perluasan sanksi pidana bagi korporasi/organisasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, orang-orang yang mengarah kepada korporasi/organisasi;
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. Kekhususan terhadap hukum secara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjang penangkapan dan perubahan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum;
- f. Perlindungan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;

- g. Pencegahan tindak pidana terorisme oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang di koordinasi oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme); dan
- h. Kelembagaan BNPT, peran TNI, dan pengawasan.

(Undang-Undang 2018).

Kebijakan pemerintah Filipina dalam penanggulangan terorisme diatur dalam *Republic Act No.9372* atau lebih dikenal dengan nama *Human Security Act of 2007*. Dalam *Human Security Act of 2007*, pemerintah mengatur tentang hukuman terhadap pelaku terorisme di jatuhkan hukuman 40 tahun penjara tanpa adanya subsidi dan pembebasan bersyarat hukuman ini diatur dalam *The Revised Penal Code of The Philippines* atau dikenal juga sebagai *Act No. 3815* dimana dalam HSA lebih memiliki cakupan yang lebih luas dalam cakupan pidana dan tidak adanya hukuman pidana mati kepada tersangka pelaku aksi, ataupun para kelompok teroris. (Philippine 2007).

Dalam hal pembaruan hukuman ini berkaitan MLAT sebagai sebuah kebijakan jika seorang/kelompok teroris tertangkap di negara anggota ASEAN dan dapat diadili dengan hukum di masing masing negara baik Indonesia-Filipina maupun negara anggota lain nya, MLAT hanya menjadi jembatan untuk penentuan dimana tersangka terorisme di jatuhkan hukuman.

3.5 Kerja Sama Regional Maupun Internasional dalam Penanganan Kontraterorisme

Dalam pengembangan kerja sama penanganan terorisme baik secara regional maupun internasional melibatkan berbagai aktor khususnya dalam menangani kasus terorisme kelompok Abu Sayyaf yang ada di Asia Tenggara juga berdampak pada keamanan transnasional maupun internasional, ASEAN sebagai organisasi dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga ikut andil dalam permasalahan keamanan kawasan di Asia Tenggara. Dalam segi keamanan kawasan tak hanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja yang ikut andil, beberapa negara di wilayah Asia Pasifik seperti Australia, beberapa negara kawasan Asia dan Amerika Serikat juga ikut andil dalam beberapa kerja sama internasional hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama baik secara bilateral, trilateral, maupun secara internasional hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional.

Dalam beberapa kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina juga melibatkan aktor di luar negara seperti ASEAN yang juga ikut terlibat dalam penanggulangan kelompok Abu Sayyaf maupun kelompok terorisme lainnya, di lihat dari kerja sama antara pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan Filipina memiliki hubungan yang sangat dekat dimana kedua negara sudah banyak melakukan kerja sama baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Hubungan kerja sama yang sudah terjalin lebih 70 tahun memang terjalin sangat baik dilihat dari berbagai kerja sama yang telah terjalin, jika dilihat dari karakteristik kedua negara baik dari Indonesia maupun Filipina memiliki perbandingan yang tidak begitu jauh dan cenderung memiliki banyak persamaan baik dari geografis yang

memiliki persamaan dimana kedua negara merupakan negara kepulauan/negara maritim selain itu, dilihat dari karakteristik masyarakat yang merupakan ras Malayan mongoloid yang masih merupakan masyarakat serumpun di Asia Tenggara, dan dilihat dari karakteristik budaya juga memiliki kesamaan mulai dari banyaknya warga keturunan melayu dan Melanesia yang ada di kedua wilayah negara masing-masing hal ini menunjukkan kedekatan yang sangat terlihat secara menyeluruh (kompas.id 2022).

Pasca perompakan kapal Brahma 12 yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan sulu juga sangat berdampak bagi keamanan kedua negara. Dilihat dari faktor ekonomi Indonesia dan Filipina juga mempengaruhi pengamanan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Filipina dimana jalur laut merupakan penghubung kerja sama ekonomi antar kedua negara, keamanan laut sulu juga sangat penting dimana kawasan ini merupakan kawasan strategis bagi perekonomian Indonesia dan Filipina dikarenakan wilayah perairan sulu merupakan jalur lalu lalang perniagaan kapal-kapal pengiriman komoditas ekspor impor, selain itu perairan Sulu juga merupakan wilayah penyeberangan bagi orang-orang yang ingin ke Filipina maupun sebaliknya, setiap tahun kurang lebih ada sekitar kurang lebih 100.000 kapal yang melalui wilayah perairan Sulu dengan muatan lebih dari 50 juta ton metrik dan lebih kurang 18 juta jiwa penumpang tiap tahunnya yang lalu lalang di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina (Irantung 2017).

Indonesia dan Filipina, dua negara yang sama-sama terkait dengan satu sama lain dalam permasalahan terorisme, yang menjadi salah satu kerja sama bilateral

antara kedua negara untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme yang merajalela di kedua kawasan tersebut. Terutama untuk melawan kelompok Abu Sayyaf yang berkembang di Filipina dan sampai di Indonesia, mengakibatkan keamanan kedua negara merasa terancam. Kerja sama Indonesia dan Filipina dalam melindungi negara masing-masing dari serangan terorisme oleh kelompok Abu Sayyaf tidak bisa untuk diabaikan. Sehingga terjadi penandatanganan kerja sama dalam kontraterorisme antara instansi kepolisian Indonesia dan Filipina setuju untuk memberikan informasi dari masing-masing pihak, guna mempercepat segala bentuk perlawanan terhadap kelompok teroris Abu Sayyaf (Meisandi 2011). Seperti yang diketahui bahwa kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok teroris yang cukup ditakuti di Filipina, diakibatkan oleh cukup sering melakukan hal-hal kejam, menculik, meminta tebusan, dan mencuri. Berjumlah sekitar 8 kali kelompok tersebut melakukan penculikan dan meminta tebusan kepada Indonesia dikarenakan WNI yang menjadi tawanan, terjadi pada kurun waktu 2015-2016. Akibat peristiwa yang mengancam kedamaian masyarakat dari dua negara bersangkutan, semakin gencar kedua negara melangsungkan kerja sama untuk mengurangi dampak yang semakin besar akibat dari perbuatan kelompok Abu Sayyaf (Getty 2016).

Pada pemerintahan Joko Widodo tahun 2016 perjanjian mengenai kontraterorisme diperbaharui lagi, diperlihatkan dengan persetujuan kerja sama bidang pendidikan oleh kedua negara. Bidang pendidikan menjadi salah satu upaya dari kedua negara untuk mengurangi bertambahnya jumlah teroris yang ada. Sebab di Indonesia dan Filipina pada beberapa kawasan yang memeluk agama islam dapat

mempelajari islam sebagaimana mestinya, tidak mengarah pada hal yang ekstremis (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2023). Kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat yaitu masyarakat dapat mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya untuk menghindari terjadinya pembodohan dengan bergabung ke dalam kelompok Abu Sayyaf. Kerja sama lainnya dari Indonesia dan Filipina dalam pertemuan *The Joint Working Group "(JWG)" on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* pada tahun 2017 diketahui membahas mengenai perihal yang lebih luas, tidak hanya ancaman keamanan terorisme domestik, melainkan terorisme dunia siber (BNPT, 2022). Bentuk-bentuk kerja sama tersebut merupakan sebuah bentuk dari proses Indonesia dan Filipina dalam melangsungkan kontraterorisme, yang mengancam perdamaian keamanan kedua negara, baik itu kerja sama yang melibatkan negara lain maupun hanya bersifat bilateral.

Indonesia dan Filipina tentu memiliki hubungan yang baik akibat dari kedua negara memiliki tata letak geografis yang berdekatan yaitu Asia Tenggara, bahkan kedua negara merupakan bagian dari organisasi regional kawasan Asia Tenggara yakni ASEAN, salah satu organisasi yang tergabung dari sejumlah negara di Asia Tenggara bertotalkan 10 anggota saat ini, memiliki tujuan untuk meningkatkan kemajuan dari negara negara yang tergabung, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, serta perdamaian dan keamanan (Moon and Chow 2022). Dalam penelitian ini fokus permasalahan berada pada kasus mengenai terorisme dari kelompok Abu Sayyaf yang menghantui Indonesia dan Filipina. Tentunya untuk meningkatkan keamanan di wilayah Indonesia dan Filipina, kedua negara tidak dapat mengelak

melaksanakan kerja sama yang ada terutama untuk melakukan kontraterorisme. Tidak hanya kedua negara, melainkan ASEAN juga memiliki andil yang cukup terkait dengan pertahanan keamanan dari kedua negara tersebut. Selain itu, beberapa negara di wilayah Asia Pasifik seperti Australia, beberapa negara kawasan Asia dan Amerika Serikat juga ikut andil dalam beberapa kerja sama internasional hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama baik secara bilateral, trilateral, maupun secara internasional hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional terutama yang memiliki keterkaitan tentang terorisme.

Indonesia dan Filipina yang sudah bergabung dengan ASEAN sejak lama tentunya selalu mengikuti segala bentuk proses dari perjanjian maupun kerja sama di dalam komunitas tersebut, terutama mengenai terorisme. Salah satu contoh yakni *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM) yang dibentuk pada tahun 2004 guna peningkatan keamanan perdamaian, dan stabilitas di kawasan ASEAN, pertemuan ADMM sendiri dilakukan setiap tahun nya dan di wakili oleh menteri pertahanan setiap negara anggota ASEAN dan beberapa negara mitra seperti China, Amerika, Australia, Republik Korea, India, Rusia, dan Selandia Baru. Kegiatan utama yang dilakukan oleh negara yang tergabung dalam melawan terorisme yaitu dengan melakukan latihan bersama, membagi informasi terkait teroris, serta berdialog (ASEAN 2018). Kerja sama pada tingkat ASEAN tersebut merupakan sebuah kerja sama yang mempermudah Indonesia dan Filipina dalam menjalankan aksi kontra terorisme kedua negara untuk mengurangi pengaruh dari Abu Sayyaf. Kerja sama

kedua negara dipermudah dengan letak geografis kedua negara yang memiliki persamaan geografis kepulauan, sehingga dapat menjadikan kedua negara untuk membagi informasi untuk melawan para terorisme di kedua negara.

Isu terorisme telah menjadi ancaman keamanan di negara-negara ASEAN selama berpuluh-puluh tahun. Berbagai deklarasi kerjasama regional maupun internasional telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan serta meningkatkan pencegahan terhadap serangan-serangan terorisme. Misalnya saja dengan dibentuknya ASEAN *Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar bagi ASEAN dalam mengatasi tindak terorisme. Namun meski telah memiliki ACCT, negara-negara di ASEAN masih memiliki perbedaan paradigma dalam menanggulangi terorisme (Pradnyana 2022, 24).

3.6 Pengelolaan Media Agar Tidak Ada Penggiringan Opini yang Dibuat-buat Terkait Aksi Terorisme

Dalam perkembangannya, aksi terorisme mempunyai akar sejarah dalam konteks perkembangan di Indonesia sebagai negara-bangsa, di Indonesia maupun Internasional dinamika aksi Terorisme memiliki faktor dan motivasi yang relatif sama. Di Indonesia teror politik diarahkan untuk menghadapi penjajah Belanda saat itu, di dunia internasional teror politik digunakan untuk mengganti rezim dalam sejarah Revolusi Perancis. Menyadari perkembangan itu, dewasa ini dalam era modernisasi pemerintah berperan aktif dalam strategi dan aksi pemberantasan

terorisme, perlunya peran media massa dalam turut hadir dalam melakukan perannya sebagai pendekatan dalam langkah pemberantasan terorisme perlu dilakukan.

Peran media massa dalam peliputan media tentunya dapat mempolarisasi opini publik dalam menanggapi aksi teroris, media massa dapat dengan mudah menciptakan dua ketergantungan, yakni publisitas bagi teroris dan koperasi untuk masyarakat dalam pemberitaan teroris. Tentunya hal ini media terkadang dapat melakukan keberpihakan tertentu yang dapat menyebabkan aksi teror dapat kian berlanjut. Selain itu, pemberitaan yang dapat dilakukan media massa juga dapat menjadikan berbeda ketika suatu pemberitaan mengenai teroris diberitakan oleh media khusus. Dalam memberantas terorisme diperlukan kerja sama yang baik antara institusi media dan pemerintah. Karena dalam hal ini, media massa mampu membentuk opini publik, sementara pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan (Wardani, 2017).

Fleksibilitas pemberitahuan isu terorisme pada media di Indonesia mempunyai hubungan erat pada era kini, namun terorisme juga sudah ada jauh sebelum berkembangnya media atau teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada era teknologi informasi ini media sangat berperan dalam hal publikasi. Isu mengenai terorisme pun menjadi suatu isu yang memiliki pengaruh besar pada media di Indonesia. Seperti data yang diperoleh peneliti, isu terorisme merupakan isu yang paling dibahas pada media massa sepanjang tahun 2015 menurut Riset Indonesia Indicator (I2) yaitu mendominasi pemberitaan di 1.230 media *online* nasional dan media *online* internasional berbahasa Inggris. Itulah sebabnya isu terorisme di

Indonesia dapat menyebar dengan sangat cepat, media di Indonesia pun mengeluarkan reaksi yang massif sehingga isu terorisme dapat dengan mudahnya menutupi isu-isu lain yang dianggap tidak terlalu penting.

Untuk itu peran pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang RI no. 40 tahun 1999 tentang Pers pada pasal 9 ayat 1 khususnya alinea 2 menjelaskan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu terkait terorisme, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk turut serta membatasi persebaran paham terorisme dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral, sebaiknya reportase yang terkait teroris dipilah sebelum disiarkan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam kasus terorisme, pemberitaan media massa semestinya tidak hanya mengedepankan aspek bisnis semata atau menaikan rating saja. Akan tetapi media juga perlu memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah dan bisa mengajak masyarakat untuk menyikapi kasus terorisme. Peran aktif media dalam pemberitaan di harapkan tidak menimbulkan akses negatif bagi pemirsa atau pembacanya, dan diharapkan dapat mencegah lahirnya teroris baru karena terinspirasi oleh pemberitaan yang ada. Peran pemerintah Indonesia melalui BNPT, melalui media dan informasi mendorong pembangunan BNPT Chanel TV untuk melawan radikalisasi, merilis I-KHub dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pemerintah, mitra internasional, dan OMS (organisasi masyarakat sipil), serta meluncurkan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dalam mendukung program deradikalisasi”.

Kerja sama yang dilakukan antar Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi aksi terorisme, Filipina juga memainkan perannya dalam pemberitaan di media massa. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan pemerintah Filipina dalam penanggulangan terorisme internasional di masa pandemi melalui *The Joint Working Group (JWG) on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia pada 2020*. Dimana propaganda, perekrutan, dan juga penggalangan dana melalui ruang cyber dan media massa memiliki target audience *online*. Untuk itu dalam kerja sama dengan mensosialisasikan narasi kontra-radikalisasi melalui website, buku, majalah, dan poster dapat memungkinkan membendung audiensi dalam melawan terorisme di kedua negara (Sudoyo, 2022).

Dalam penyampaian informasi di media massa agar menyerap informasi yang sesuai dengan informasi yang terjadi di lapangan, sebagai contoh ketika pembebasan sandera 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf pemerintah Indonesia dan Filipina melakukan konferensi pers yang bertujuan untuk memberikan informasi yang kredibel dan cara ini sangat efektif dalam menampilkan informasi yang terpercaya.



Gambar 1.1

Sumber: news.detik.com/berita/d-3204001/filipina-pemerintah-ri-sudah-lakukan-yang-terbaik-untuk-pembebasan-10-wni

selain itu adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana setiap jurnalis/wartawan harus memberi informasi yang kredibel dan dengan tanggung jawab untuk menjalankan profesinya. (UUD NO 9 TAHUN 1999 n.d.)

Dalam hal pengelolaan media terkait media yang diatur oleh pemerintah Filipina melalui Undang Undang diatur dalam Bill of Rights Konstitusi Filipina (Pasal 3, Bagian 4), yang menyatakan bahwa “Tidak ada undang-undang yang akan disahkan yang membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, atau pers, atau hak rakyat secara damai untuk berkumpul dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk memperbaiki keluhan, hal ini membebaskan pers untuk membuat berita namun dalam cakupan berita tentang terorisme pemerintah Filipina mengelola pemberitaan

dengan cara melakukan konferensi pers dan kemudian pers bisa membuat berita terkait terorisme yang terjadi hal ini di nilai oleh pemerintah Filipina guna untuk mendapatkan informasi yang lebih kredibel dan menjaga informasi tetap terpercaya.

Memanfaatkan sosial media lawan terorisme justru memiliki peran dalam melawan terorisme. Pemanfaatan media sosial menjadi alat efektif untuk memerangi terorisme, karena penggunaan media sosial di Filipina cukup tinggi. Rata-rata, orang Filipina menghabiskan 4 jam per hari untuk menggunakan platform media sosial, menurut aktivis dan jurnalis dari Filipina Andrea Toledo menggunakan sosial media untuk berdialog dengan pengikutnya dalam memerangi terorisme adalah sebuah cara dimana sosial media dapat memproduksi konten untuk melawan terorisme langkah baik dalam menggiring opini penonton atau pembaca. Menurutnya juga konten yang ada dapat menghubungkan dan menjembatani jarak, memungkinkan pembuat konten untuk berbagi informasi melalui media digital. Namun tingginya media sosial juga bisa menjadikan ceruk baru bagi teroris untuk melakukan propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana. Biasanya menggunakan konten media sosial dapat menjadikan para pelaku teror memikat orang-orang rentan, merekrut individu dalam kelompok. Termasuk dalam merencanakan dalam melaksanakan serangan teror di berbagai belahan dunia (Herlina, 2021).

Jadi ada nya keterlibatan media khusus, juga merupakan suatu jalan untuk melihat aksi terorisme dari sisi yang berbeda. Terkadang media khusus tidak serta merta melakukan penuduhan sepihak terhadap pelaku teror. Sebagai pengkonsumsi media, ada baiknya agar para audiens benar-benar cerdas dalam menanggapi

pemberitaan mengenai aksi terorisme yang berlangsung. Mengonsumsi pemberitaan yang dibuat media khusus dapat menjadikan suatu perbandingan mengenai pemberitaan teroris yang dimuat oleh media *mainstream*.

Perkembangan teknologi membuat berbagai hal mudah didapatkan, salah satunya berita. Kini semua orang dapat dengan mudah mengakses berita dari berbagai belahan dunia. Berbagai berita dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, termasuk berita mengenai kelompok terorisme. Hal ini tentunya menguntungkan kita untuk selalu *update* dengan berita yang ada diluar sana, namun disisi lain hal ini dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi kaum muslim. Mudahnya mengakses berita mengenai terorisme membuat semua orang tau dan bisa berspekulasi, hal ini terkadang membuat umat muslim yang tidak ada hubungannya dengan kasus terorisme harus menanggung akibat yang sama dengan pelaku terorisme. Pemberitaan yang terlalu dilebih-lebihkan dapat membuat kaum muslim mendapatkan kebencian dari orang diluar sana dan menganggap Islam sebagai agama teroris. Oleh karena itu sebagai pengguna teknologi kita harus bijak, baik sebagai pembaca maupun penulis berita.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melihat dinamika gerakan Abu Sayyaf sebagai salah satu kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam sebagai basis pergerakan kelompoknya, dapat dianalisis bahwa gerakan yang berlokasi di beberapa wilayah yakni Basilan, Mindanao dan Jolo ini sangat sulit untuk ditebak. Hal ini disebabkan oleh pergerakannya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok kecil, meskipun aksinya seringkali dilakukan secara terang-terangan. Salah satu contohnya yakni ketika Abu Sayyaf berperang melawan militer Filipina. Selama jangka waktu tiga tahun, terjadi banyak kasus teror yang didalangi oleh kelompok teroris radikal muslim di Filipina. Dalam hal ini, Abu Sayyaf menjadi kelompok yang terafiliasi dengan 2045 kasus teror yang terjadi pada rentang tahun 2015-2017. Tidak hanya terafiliasi kepada kasus-kasus teror, Abu Sayyaf turut menjalin relasi dengan jaringan kelompok separatis yang lebih besar lainnya. Sehingga berdasarkan data terkait jangkauan kasus terorisme di Filipina, sekitar 70% kasus teror didalangi oleh kelompok Abu Sayyaf dan berbagai kelompok besar yang berafiliasi langsung dengannya.

Maka menanggapi fenomena tersebut, Filipina berupaya menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam menanggulangi gerakan terorisme kelompok Abu Sayyaf. Dalam hal ini, proses kerja sama tersebut akan berfokus pada kebijakan aksi dan kontra aksi yang meliputi beberapa kerja sama. Salah satu diantaranya adalah kerja

sama dalam pelacakan pendanaan kelompok Abu Sayyaf yang di prakarsai oleh BI (Bank Indonesia) dan BSP (Banko Sentral Ng Filipina). Kerja sama pelacakan dana kelompok terorisme Abu Sayyaf diaplikasikan dengan prinsip KYC (Know Your Customer Principle). Prinsip KYC ini berfokus pada pengecekan sumber dana perorangan yang mencurigakan, serta pengecekan sumber dana di luar mata uang negara/mata uang digital seperti *bitcoin*. Dari kerjasama yang dilakukan oleh AMLC Filipina dan PPATK Indonesia, penanggulangan aksi terorisme di kedua negara dapat terlaksana dengan baik akibat kerjasama yang baik dan diketahui bahwa aliran pendanaan untuk terorisme sampai April tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun lalu (2018).

Melanjutkan proses kerja sama yang terjalin antara Filipina dan Indonesia dalam pelacakan pendanaan kelompok Abu Sayyaf, Indonesia dan Filipina terus terfokus dalam melakukan pengembangan teknologi seperti melakukan pengembangan *software* dan mempertajam pengamatan media. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan proses pelacakan dana terorisme terhadap kelompok Abu Sayyaf.

Tidak hanya melakukan pengembangan dari segi teknologi, Filipina dan Indonesia turut memperluas cakupan kerja samanya dalam pengembangan personil militer dan kepolisian. Dalam hal ini, kedua negara bersama-sama mengembangkan pendidikan anggota militer dan polisi. Selain itu, dilakukan juga pengembangan penguasaan medan, penguasaan senjata, mental hingga memperkuat latihan patroli di masing-masing negara. Berbagai pengembangan tersebut terus digencarkan guna

mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi aksi teror kelompok radikal Islam seperti Abu Sayyaf. Selain itu terdapat beberapa implementasi kerjasama yang telah dilakukan kedua negara untuk mencegah terorisme, diantaranya: patroli laut, patroli udara, melakukan *Quick Respond*, membentuk pos komando maritim, kelompok kerja patroli maritim, koridor transit di wilayah maritim sebagai jalur laut, informasi dan pembagian intelijen, serta berbagi mekanisme database trilateral, membentuk *Hotline Communication*.

Meski pengembangan dari segi teknologi dan militer telah dilakukan, Filipina dan Indonesia juga memahami bahwa lembaga-lembaga anti terorisme juga memiliki peran yang signifikan dalam menanggulangi aksi terorisme, sehingga penting untuk turut dikembangkan. Dalam hal ini, berbagai lembaga anti terorisme dari kedua negara ikut terjun langsung dalam melakukan penanggulangan aksi terorisme, serta aktif melakukan pengembangan kapabilitas SDM di masing-masing lembaga. Berbagai lembaga tersebut diantaranya adalah BIN (Badan Intelijen Nasional), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kejaksaan RI (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia), Kemenkumham RI (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia), BSSN RI (Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia) dan dari pihak Filipina NICA (National Intelligence Coordinating Agency), ALMC (Anti-Money Laundering Council), BI (Bureau of Immigration) dan ATC-PMC (Anti-Terrorism Council Program Management Center). Salah satu lembaga yang bekerjasama adalah PPATK Indonesia dan ALMC Filipina. Kedua lembaga tersebut

bekerjasama dalam program pelacakan pendanaan terorisme serta pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok terorisme di Indonesia-Filipina.

Selain melakukan pengembangan dalam bidang teknologi, militer hingga lembaga-lembaga antiterorisme. Filipina dan Indonesia juga memperkuat regulasi kebijakan terkait terorisme di masing-masing negara guna memaksimalkan proses kerja sama dalam menanggulangi gerakan kelompok teroris seperti Abu Sayyaf. Seperti misalnya, pada tahun 2018, Indonesia memperbarui UU RI No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Tidak hanya Indonesia yang memperkuat regulasinya, Filipina juga mengatur UU terorisme Republic Act No.9372. UU ini lebih dikenal dengan nama Human Security Act of 2007, tercantum dalam UU Filipina dengan cakupan hukum lebih luas.

Kemudian, upaya lain yang dilakukan Filipina dan Indonesia dalam menyikapi gerakan terorisme adalah menjalin kerja sama regional. Diantaranya seperti melibatkan diri forum *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)*. Tidak hanya itu, Filipina dan Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral yakni melalui *The Joint Working Group (JWG) on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* pada tahun 2017 sebagai upaya memaksimalkan penanggulangan terorisme di kedua negara. Terakhir, faktor yang turut diperhatikan oleh Filipina Indonesia

dalam upaya penanggulangan terorisme adalah melakukan pengelolaan media massa. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penggiringan opini serta penyebaran hoaks kepada publik terkait kasus terorisme. Sehingga, setelah dianalisis dari berbagai upaya kerja sama yang terjalin antara Filipina dan Indonesia dalam kurun waktu 2015-2020. Penulis menyimpulkan bahwa kerja sama-kerja sama tersebut berjalan dengan cukup efektif, serta memiliki dampak yang cukup positif terhadap upaya penanggulangan terorisme kelompok Abu Sayyaf.

4.2 Rekomendasi

Kelompok terorisme Abu Sayyaf merupakan kelompok teroris yang mendiami daerah Filipina Selatan dimana kelompok ini menjadi salah satu kelompok teroris yang mendiami Asia Tenggara, seharusnya dalam penanganan kelompok Abu Sayyaf harusnya bukan hanya dari pemerintah Indonesia dan Filipina namun, seluruh anggota ASEAN ikut menanggulangi aksi maupun kontra aksi agar minimal dapat membatasi pergerakan kelompok Abu Sayyaf, dimana kerja sama yang dilakukan harus menggunakan aksi melalui kerja sama ASEAN yang harus membuat kebijakan pengamanan wilayah Filipina selatan dengan cara membuat patroli militer di wilayah Filipina Selatan namun juga diimbangi dengan adanya pendekatan dengan cara soft diplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf, soft diplomasi sangat berdampak besar dimana pada pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf pada 2016 dapat dibebaskan dengan diplomasi total dan dengan hal ini seharusnya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara mengatasi kelompok ini dan mungkin dengan cara berdialog dengan petinggi kelompok Abu Sayyaf dan bernegosiasi tentang apa yang

kelompok ini inginkan dan dapat minimal mengontrol kelompok ini dengan tujuan perlahan membubarkan kelompok Abu Sayyaf, dibandingkan dengan pendekatan secara militer yang hanya mengakibatkan pertumpahan darah dan tidak akan ada jalan keluar dikarenakan baik dari kedua belah pihak merasa sama-sama terancam.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Syarifah Wisa. 2018. "Kelompok Separatis Pro ISIS di Filipina Selatan." *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* 231-238.
- ASEAN. 2004. "Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters." ASEAN. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/20160901074559.pdf>.
- Bakker, Felix Ferdin, Andhika Pratama Putra, and Respati Triana Putri. 2020. "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara." *Journal of Law and Border Protection* 2: 47-58.
- BBC Indonesia. 2016. "Presiden: Pembebasan 10 WNI dari Abu Sayyaf hasil kerja sama banyak pihak." *BBC*. 1 May. Accessed January 23, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_wni_sandera_bebsa.
- BNPT. 2022. "Indonesia-Filipina Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Joint Working Group ke-4." *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*. 24 March. Accessed January 23, 2023. <https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-melalui-joint-working-group-ke-4>.
- BW. 2017. "Indonesia-Filipina Kerja Sama Perangi Terorisme." *BeritaSatu.com*. 10 August. <https://www.beritasatu.com/news/446554/indonesiafilipina-kerja-sama-perangi-terorisme>.
- Dayana, Anggit Seiani. 2019. "6 Kelompok Teroris Asia Tenggara di Daftar CIA: ISIS Hingga JAD." *Tirto.ID*. 14 November. <https://tirto.id/6-kelompok-teroris-asia-tenggara-di-daftar-cia-isis-hingga-jad-elC8>.
- Fellman, Zack. 2011. "Abu Sayyaf Group." Center for Strategic and International Studies (CSIS), November.
- Fuad, Noor Azharul. n.d. "The decline of Terrorist Group: Penyebab Menurunnya Aksi Teror Kelompok Al-Qaeda Tahun 2009-2013." *Journal of International Relation* 2: 180-188.
- Gischa, Serafica. 2020. "Latar Belakang Kesamaan Sejarah dalam Pembentukan ASEAN Halaman all." *Kompas.com*. 17 July. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/141951069/latar-belakang-kesamaan-sejarah-dalam-pembentukan-asean?page=all>.
- Gofur, Abd. 2016. "Dinamika muslim moro di Filipina selatan dan gerakan separatis Abu Sayyaf." *Sosial Budaya* 13.

- Handi, Aryana Meisandi. 2016. "Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam mengatasi Masalah Terorisme Jaringan Internasional (2011-2014)."
- Herdayatamma, K. L., Sulistiyanto, and Suprpto. 2022. "Kesiapan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Terorisme Untuk Mendukung Pertahanan Negara." *Jurnal Manajemen Pertahanan* 8.
- Herlina, Betty. 2021. "Dua Sisi Media dalam Pemberitaan Terorisme – DW – 26.11.2021." *DW*. 26 November. <https://www.dw.com/id/bias-media-dalam-memberitakan-terorisme/a-59935655>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. "Indonesia Philippines Promote Islamic Education Cooperation." *Stengthening The Relationship*. 6 January. <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Stengthening-the-Relationship,-Indonesia-Philippines-Promote-Islamic-Education-Cooperation.aspx>.
- Kusumah, Mulyana W. 2002. "Terorisme dalam perspektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2: 22-29.
- Manalu, Juli E.R. 2017. "Terduga Teroris Sulteng Berafiliasi ke Jaringan Abu Sayyaf." *Solopos*. 15 Maret. Accessed January 23, 2023. <https://www.solopos.com/9-terduga-teroris-sulteng-berafiliasi-ke-jaringan-abu-sayyaf-801783>.
- Misya, M. Herry. 2017. "Efektivitas Joint Press Statement dalam Menanggulangi." *Journal of International Relations* 4.
- Moon, Chung in, and Jonathan T Chow. 2022. "ASEAN | Definition, History, & Facts | Britannica." *Encyclopedia Britannica*. 27 December. <https://www.britannica.com/topic/ASEAN>.
- Novia, Dyah Ratna Meta. 2019. "Abu Sayyaf Setia pada ISIS untuk Dapatkan Dana Operasi." *JawaPos.com*. 6 February. Accessed January 23, 2023. <https://www.jawapos.com/internasional/06/02/2019/abu-sayyaf-setia-pada-isis-untuk-dapatkan-dana-operasi/>.
- Nurhakim, Irfan. 2017. "Kerjasama Amerika Serikat-Filipina dalam Perang Melawan." *Global Political Studies Journal* 1: 25-36.
- Permono, Prakoso. 2019. "Abu Sayyaf Group in Southern Philippines after Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao." *Global Strategies* 3: 109-122.
- Pertiwi, Nelin Dias, Ika Riswanti Putranti, and Marten Hanura. 2022. "Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering." *Journal of International Relations* 8: 613-628.

- Pradnyana, Hadi. 2022. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terrorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN." *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintah* 2: 11-26.
- Qolbi, Nur, Fitrah Marinda, and Rina Yulianti. 2020. "ASEAN Against Cyber Terrorism: Upaya Mengatasi Propaganda Hitam sebagai Kejahatan Siber Terorganisasi." *Legislatif: Lembaga Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Informatif* 4: 106-123.
- Republic of Philippine. 1930. "Act No. 3815." *Lawphil*. https://lawphil.net/statutes/acts/act_3815_1930.html.
- Republik Indonesia. 1999. "Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 1999."
- . 2018. "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018."
- Rezky, Ade Nurul. 2018. "Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6: 1281-1298.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: (Qualitative research approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santosa, Iwan. 2016. "'Bisnis' Abu Sayyaf dan Solusi Indonesia." *Kompas.com*. 10 May. Accessed January 23, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/05100011/.Bisnis.Abu.Sayyaf.dan.Solusi.Indonesia?page=all>.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. 2021. "Siapakah Kelompok Abu Sayyaf yang Menculik WNI di Filipina? Halaman all." *Kompas.com*. 19 March. Accessed January 23, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/20/190300865/siapakah-kelompok-abu-sayyaf-yang-menculik-wni-di-filipina-?page=all>.
- Schmid, Alex P., ed. 2013. *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. Routledge.
- Sitorus, Erwin Yusup. 2017. "The Philippine National Security Policy in The Counter Terrorism." *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris* 3: 25-38.
- Sudoyo, Wahyu. 2022. "Indonesia-Filipina Kolaborasi Penanggulangan Terrorisme di Masa Pandemi." *InfoPublik*. 24 March. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/618500/indonesia-filipina-kolaborasi-penanggulangan-terorisme-di-masa-pandemi>.
- Syaefullah, Harry Siswoyo. 2017. "Terduga Teroris di Kampung Inggris Jaringan Abu Sayyaf." *Viva*. 14 Maret. Accessed Agustus 3, 2022.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/893891-terduga-teroris-di-kampung-inggris-jaringan-abu-sayyaf?page=all>.

The FATF. 2018. "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation." *The FATF Recommendation*. October. <https://www.fatf-gafi.org/>.

Wardani, Ayu. 2017. "Peran Media dalam Pemberitaan Terorisme." *Syi'ar* 17.

Wibisono, Adhe Nuansa. 2016. "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara." *Jurnal FISIP Universitas Al-Azhar dan Freedom Foundation* 3: 119-132.

Wijaya, Pandasurya. 2016. "Sejarah terbentuknya keganasan kelompok Abu Sayyaf | merdeka.com." *Merdeka*. 11 April. <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-terbentuknya-keganasan-kelompok-abu-sayyaf.html>.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

